

PETUNJUK TEKNIS

TEKNIK DELIENASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH



**DINAS PERUMAHAN
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PEMERINTAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Daftar Isi

Daftar isi	1
Pendahuluan	2
1. Defenisi.....	5
1.1 Alur Identifikasi Penetapan Lokasi.....	11
2 Proses Identifikasi.....	12
2.1 Alur Survey dan Observasi.....	12
2.2 Pendataan Daftar Isian Baseline.....	13
2.3 Proses Penilaian Lokasi.....	15
2.4 Penentuan Klasifikasi dan Skala Penanganan.....	23
3 Proses Penetapan.....	25
3.1 SK Bupati/Walikota tentang penetapan lokasi Permukiman Kumuh	26
3.2 Penyiapan Profil	29
4. Ilustrasi Delienasi Permukiman Kumuh.....	30
Penutup	45

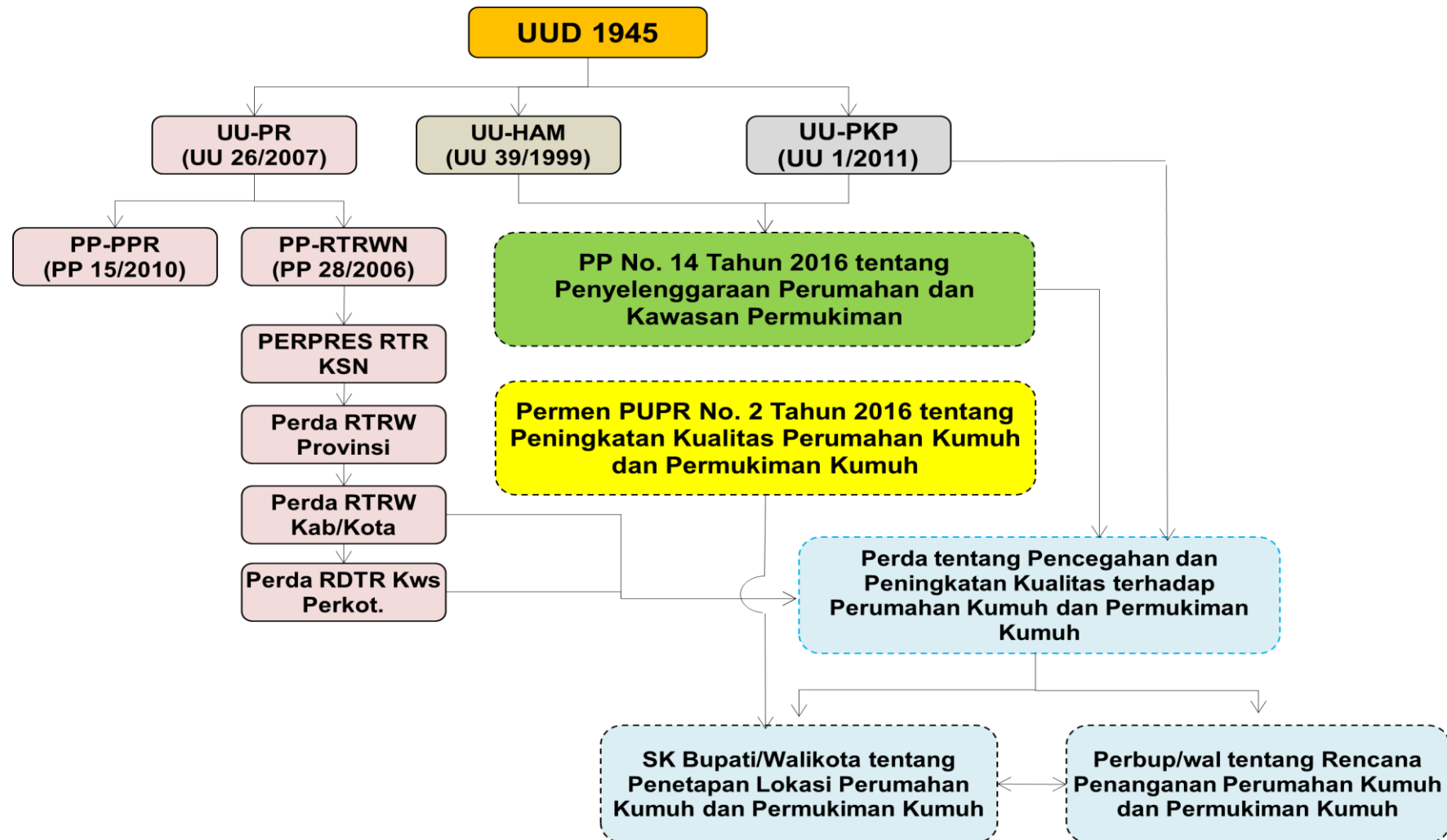
Pendahuluan

Tinggi tingkat pertumbuhan penduduk serta urbanisasi yang tidak terkontrol menyebabkan terbatasnya lokasi hunian masyarakat. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah menetapkan target untuk mengentaskan permukiman kumuh dan kemiskinan di berbagai aspek kehidupan manusia didunia sampai dengan Tahun 2030, target tersebut disampaikan melalui Sustainable Development Goals (SDGs), salah satu diantaranya adalah menjamin akses perumahan dan pelayanan dasar yang memadai, aman dan terjangkau bagi permukiman kumuh di dunia.

Sesuai amanat UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa penyelenggaraan atas perumahan dan Kawasan permukiman termasuk pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh wajib dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018 Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Penanganan terhadap permukiman kumuh sangatlah penting karena dengan adanya permukiman yang kumuh akan memberikan dampak buruk bagi penghuninya

Salah satu langkah awal yang dilakukan sebelum membangun prasarana pada kawasan permukiman kumuh adalah melakukan Delienasi kawasan atau penarikan garis batas suatu kawasan atau wilayah, yang akhirnya menentukan luasan suatu kawasan kumuh, namun tidak beragamnya metode delienasi suatu kawasan kumuh mengakibatkan pembangunan dalam rangka penuntasan kawasan kumuh menjadi tidak efektif dan efisien pencapaiannya, UU menyebutkan batasan luasan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah 10 – 15 Ha, dalam hal itu maka dibuatlah petunjuk teknis delienasi kawasan.

Peraturan Perundang – Undangn terkait Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh



Mengapa ini kumuh ???



Ketidakteraturan Bangunan



Kualitas Jalan yang Buruk



Tidak Tersedianya Sarana Pengelolaan Air Limbah



Tidak Tersedianya Sarana Persampahan

DEFENISI

Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami **penurunan kualitas fungsi** sebagai tempat **hunian**

Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat

INDIKATOR KUMUH

1 KONDISI BANGUNAN

- Keteraturan Bangunan
- Kepadatan Bangunan
- Persyaratan Teknis

2 KONDISI JALAN LINGKUNGAN

- Cakupan Pelayanan
- Kondisi/Kualitas Infrastruktur

3 KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN

- Cakupan Pelayanan
- Kondisi/Kualitas Infrastruktur

4 KONDISI PENYEDIAAN AIR MINUM

- Cakupan Pelayanan
- Kondisi/Kualitas Infrastruktur

5 KONDISI JALAN LINGKUNGAN

- Cakupan Pelayanan
- Kondisi/Kualitas Infrastruktur

6 KONDISI PENGELOLAAN SAMPAH

- Cakupan Pelayanan
- Kondisi/Kualitas Infrastruktur

7 KONDISI PENGAMANAN KEBAKARAN

- Cakupan Pelayanan
- Kondisi/Kualitas Infrastruktur

KRITERIA PERMUKIMAN KUMUH

(Permen PU N. 2 Tahun 2016 (Pasal 4 – 12))

BANGUNAN GEDUNG

- ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk
- kepadatan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang
- ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan

JALAN LINGKUNGAN

- kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
- lebar jalan yang tidak memadai
- kelengkapan jalan yang tidak memadai

PENYEDIAAN AIR MINUM

- ketidaktersediaan akses air minum
- tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
- tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan
- ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

DRAINASE LINGKUNGAN

- ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
- menimbulkan bau
- tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

- ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah
- ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku
- tercemarnya lingkungan sekitar

PENGAMANAN KEBAKARAN

- ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
- ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai
- ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
Permen PU No.2 Tahun 2016 (Pasal 13-14)

NO	TIPOLOGI	BATASAN
1	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di atas air, baik daerah pasang surut, rawa, sungai ataupun laut.
2	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada tepi badan air (sungai, pantai, danau, waduk dan sebagainya), namun berada di luar Garis Sempadan Badan Air.
3	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng < 10%.
4	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng > 10 % dan < 40%.
5	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana	Perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terletak di daerah rawan bencana alam, khususnya bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir



Perumahan /Permukiman Kumuh di Atas Air



Perumahan / Permukiman Kumuh di Tepi Air



Perumahan /permukiman Kumuh di Dataran Rendah



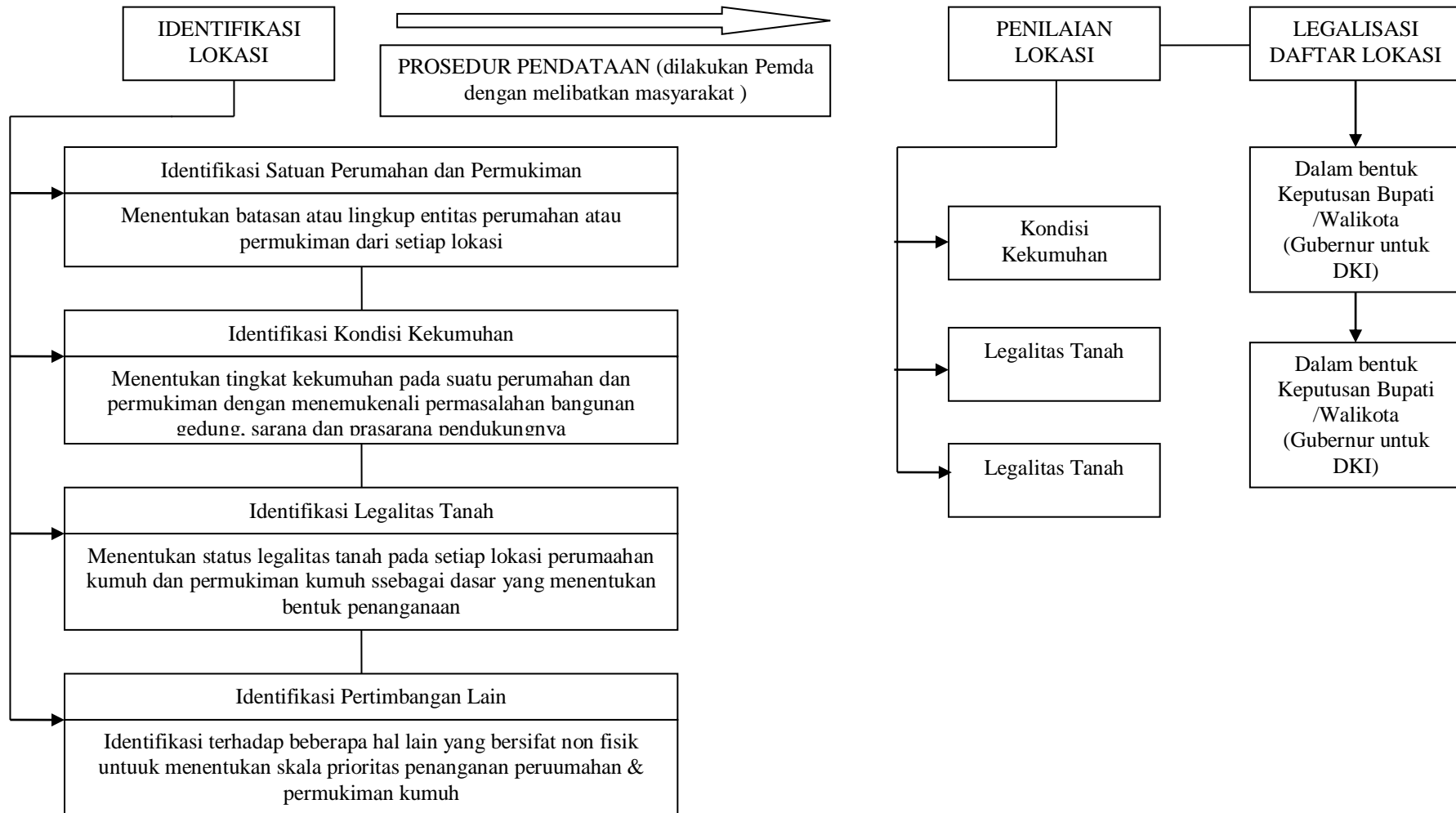
Perumahan /Permukiman Kumuh di Perbukitan

GAMBAR TIPOLOGI PERMUKIMAN KUMUH

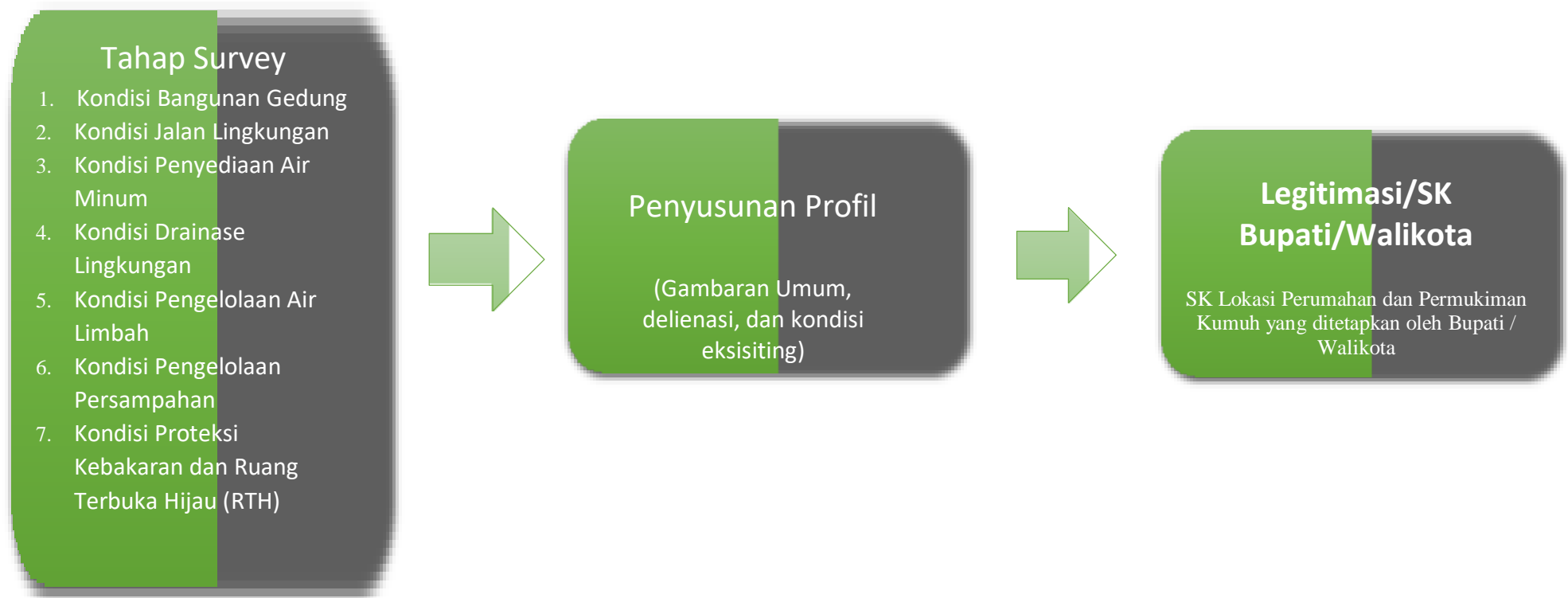


Perumahan /permukiman kumuh di Daerah Rawan Longsor

Proses Penetapan Lokasi Permen PU No.2 Tahun 2016

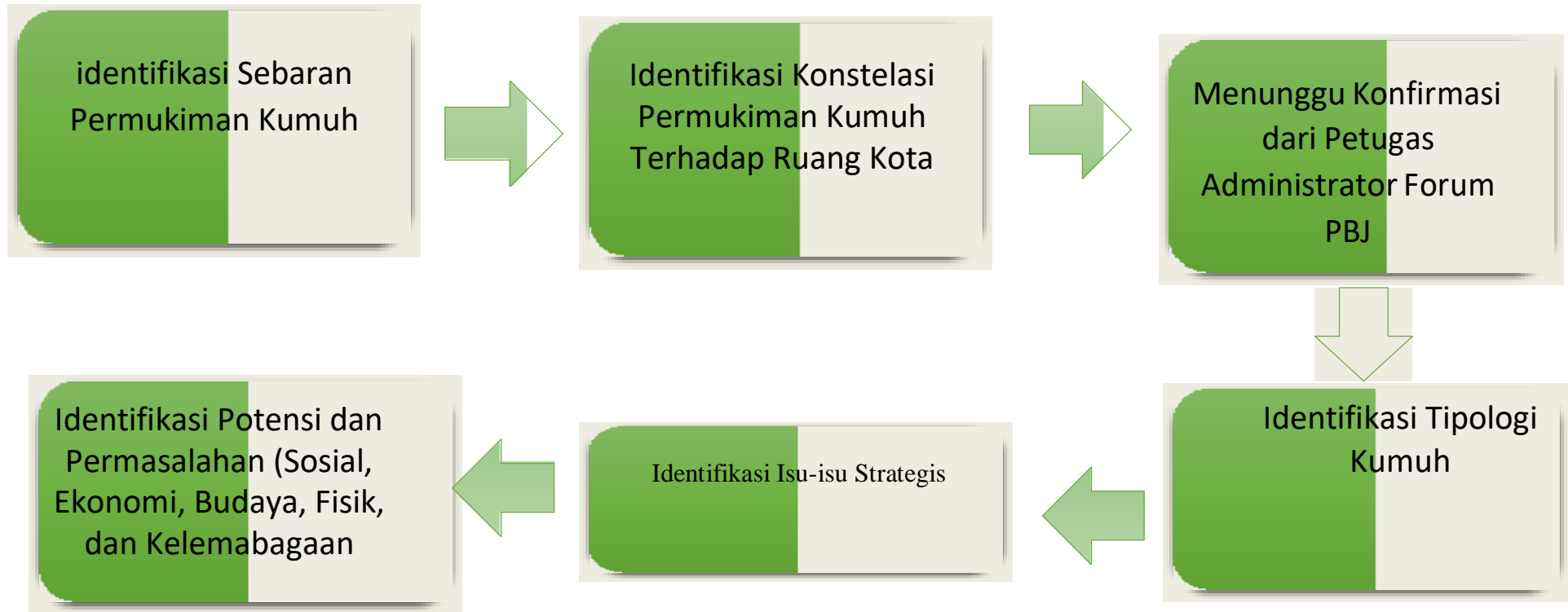


1.1 Alur Identifikasi Penetapan Lokasi



2. Proses Identifikasi

2.1 Alur Survey dan Observasi



- Sebaran permukiman kumuh
- Matriks Isu-isu strategis permukiman kumuh
- Karakteristik permukiman kumuh kota yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan, konstelasi terhadap ruang kota kawasan yang disajikan dalam peta;
- Daftar Tipologi dan peta tipologi kumuh perkotaan

2.2 Pendataan Daftar isian Baseline

KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA

DATA KAWASAN KUMUH

Kawasan	:	<input type="text"/>	Luas SK	:	<input type="text"/>
Kelurahan	:	<input type="text"/>	Luas Verifikasi	:	<input type="text"/>
Kecamatan	:	<input type="text"/>	Jumlah Bangunan	:	<input type="text"/>
Kab/Kota	:	<input type="text"/>	Jumlah Penduduk	:	<input type="text"/>
Provinsi	:	<input type="text"/>	Jumlah KK	:	<input type="text"/>

DATA NUMERIK PARAMETER KECUMUHAN

1 ASPEK KONDISI BANGUNAN GEDUNG

		Numerik
a. Ketidakteraturan bangunan	- Jumlah bangunan tidak teratur	<input type="text"/>
b. Tingkat kepadatan bangunan	- Luas kawasan dengan kepadatan 200/250 unit / ha <	<input type="text"/>
c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	- Jumlah bangunan tidak sesuai teknis	<input type="text"/>

2 ASPEK KONDISI JALAN LINGKUNGAN

a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	- Panjang jalan ideal	<input type="text"/>
	- Panjang jalan eksisting	<input type="text"/>
b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	- Panjang jalan dengan permukaan rusak	

DATA NUMERIK PARAMETER KECUMUHAN

6 ASPEK KONDISI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Numerik

a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis

- Jumlah Kkdengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis

 KK

b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis

- Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis

 KK

c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

- Jumlah KK dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara

 KK

7 ASPEK KONDISI PROTEKSI KEBAKARAN

a. Ketidatersediaan prasarana proteksi kebakaran

- Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran

 Unit

b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran

- Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran

 Ha

2.3 Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN		PARAMETER	Nilai
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan bangunan		$\frac{\text{Jumlah Bangunan Tidak teratur (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76 % - 100 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	5
				51 % - 75% bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	3
				25 % - 50 % bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan	1
	b. Tingkat kepadatan bangunan		$\frac{\text{Luas kawasan} \frac{200 \text{ unit}}{250 \text{ ha}}}{\text{Luas kawasan kumuh (Ha)}} \times 100\%$	76 % - 100 % bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan	5
				51 % - 75% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan	3
				25 % - 50 % bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan	1
	c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan		$\frac{\text{Jumlah Bangunan Tidak sesuai teknis (unit)}}{\text{Jumlah bangunan keseluruhan (unit)}} \times 100\%$	76 % - 100 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51 % - 75% bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25 % - 50 % bangunan pada lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN	PARAMETER	Nilai		
2. Kondisi jalan lingkungan	a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan	$\frac{\text{Panjang jln ideal (m)} \cdot \text{panjang jalan eksisting (m)}}{\text{Total panjang jalan ideal (m)}} \times \text{luas kawasan kumuh}$	$\frac{\text{Luas kawasn tidak terlayani jalan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	
			$\frac{\text{Luas kawasn tidak terlayani jalan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	51 % - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	
			$\frac{\text{Luas kawasn tidak terlayani jalan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	25 % - 50 % area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	
	b. Kualitas permukaan jalan lingkungan	$\frac{\text{Panjang jalan rusak (m)}}{\text{panjang jalan eksisting (m)}} \times \text{luas kawasan kumuh}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan jalan rusak}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan	5	
				$\frac{\text{Luas kawasan dengan jalan rusak}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	51 % - 75% bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan	3
				$\frac{\text{Luas kawasan dengan jalan rusak}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	25 % - 50 % bangunan pada lokasi tidak sesuai ketentuan	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN		PARAMETER	Nilai
3. Kondisi penyediaan air minum	a. Ketersediaan akses aman air minum		$\frac{\text{Jumlah KK tidak terakses air minum berkualitas}}{\text{Jml KK keseluruhan}} \times 100 \%$	76 % - 100 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	5
				51 % - 75% populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	3
				25 % - 50 % populasi tidak dapat mengakses air minum yang aman	1
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum		$\frac{\text{Jumlah KK tidak terakses air minum cukup}}{\text{Jml KK keseluruhan}} \times 100 \%$	76 % - 100 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	5
				51 % - 75% populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	3
				25 % - 50 % populasi tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN	PARAMETER	Nilai	
4. Kondisi drainase lingkungan	a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air.		$\frac{\text{Luas kawasan yang terkena genangan (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area terjadi genangan > 30 cm > 2 jam > 2x setahun	5
				51 % - 75% area terjadi genangan > 30 cm > 2 jam > 2x setahun	3
				25 % - 50 % area terjadi genangan > 30 cm > 2 jam > 2x setahun	1
	b. Ketidaktersediaan drainase	$\frac{\text{Panjang drainase ideal yang tidak terhubung (m)}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times \text{Luas kawasan genangan}$	$\frac{\text{Luas kawasan yang tidak terlayani sistem drainase (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area tidak tersedia darainase lingkungan	5
				51 % - 75% area tidak tersedia darainase lingkungan	3
				25 % - 50 % area tidak tersedia darainase lingkungan	1
	c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaa	$\frac{\text{Panjang drainase yang tidak terhubung (m)}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times \text{luas kawasan genangan (ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan tidak terhubung ke sistem drainase makro (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	5
				51 % - 75% drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	3
				25 % - 50 % drainase lingkungan tidak terhubung dengan hirarki di atasnya	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN		PARAMETER	Nilai
4. Kondisi drainase lingkungan	d. Tidak terpeliharanya drainase	$\frac{\text{Panjang sistem drainase tidak terpelihara}}{\text{Panjang drainase ideal}} \times \text{Luas kawasan genangan (Ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan drainase tidak terpelihara}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	5
				51 % - 75% area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3
				25 % - 50 % area memiliki drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1
	e. Kualitas konstruksi drainase	$\frac{\text{Panjang drainase yang buruk (m)}}{\text{Panjang drainase ideal (m)}} \times \text{luas genangan (Ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan drainase buruk (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5
				51 % - 75% area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3
				25 % - 50 % area memiliki kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN		PARAMETER	Nilai
5. Kondisi pengelolaan air limbah	a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai	$\frac{\text{Jml KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Luas KK keseluruhan}} \times \text{Luas kawasan genangan (ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan drainase tidak terpeelihara}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5
				51 % - 75% area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3
				25 % - 50 area memiliki sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1
	b. Prasarana dan saran pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	$\frac{\text{Jumla KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times \text{Luas kawasan kumuh (ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras air limbah tidak sesuai teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	5
				51 % - 75 area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	3
				25 % - 50 % area memiliki sarpras air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN		PARAMETER	Nilai
6. kondisi pengelolaan persampahan	a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis	$\frac{\text{Jml KK dengan sarpras pengolahan sampah yang tidak sesuai standar teknis}}{\text{Luas KK keseluruhan}} \times \text{Luas kawasan genangan (ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras pengolahan sampah tidak sesuai teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan}} \times 100\%$	76 % - 100 % area tmemiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5
				51 % - 75% area tmemiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3
				25 % - 50 area tmemiliki sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1
	b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	$\frac{\text{Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknik}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times \text{Luas kawasan genangan (ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai teknis}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$	76 % - 100 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	5
				51 % - 75 area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	3
				25 % - 50 % area memiliki sistem persampahan tidak sesuai standar	1
	c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasaran pengelolaan persampahan	$\frac{\text{Jumlah KK dengan Sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \times \text{Luas kawasan kumh (Ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras pengolahan sampah tidak terpelihara (Ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100\%$	76 % - 100 % area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	5
				51 % - 75% area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	3
				25 % - 50 % area memiliki sarpras persampahan yang tidak terpelihara	1

Lanjutan Proses Penilaian Lokasi

Aspek	Kriteria	DATA NUMERIK DAN RUMUS PERHITUNGAN		PARAMETER	Nilai
7. Kondisi proteksi kebakaran	a. Ketidakterediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah KK dengan sistem air limbah tidak sesuai standar teknis $\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Luas KK keseluruhan}} \times \text{Luas kawasan genangan (ha)}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan drainase tidak terpelihara}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	5
				51 % - 75% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	3
				25 % - 50 area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1
	b. Ketidakterediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai standar teknis $\frac{\text{Jumlah KK}}{\text{Luas kawasan kumuh (ha)}}$	$\frac{\text{Luas kawasan dengan sarpras air limbah tidak sesuai teknis (ha)}}{\text{Luas kawasan keseluruhan (Ha)}} \times 100 \%$	76 % - 100 % area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5
				51 % - 75 area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3
				25 % - 50 % area tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1

2.4 Penentuan Klasifikasi dan Skala Penanganan

Formulasi Hasil Penilaian Penentuan Klasifikasi dan Skala Prioritas Penanganan

NILAI	KETERANGAN	BERBAGAI KEMUNGKINAN KLASIFIKASI																	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1	B2	B3	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Kondisi Kekumuhan																			
71 - 95	Kumuh Berat	X	X	X	X	X	X												
45 - 70	Kumuh Sedang							X	X	X	X	X	X						
19 - 44	Kumuh Ringan													X	X	X	X	X	X
Legalitas tanah																			
(+)	Status Tanah Legal	X		X		X		X		X		X		X		X		X	
(-)	Status Tanah Tidak Legal		X		X		X		X		X		X		X		X		
Pertimbangan Lain																			
11 - 15	Pertimbangan Lain Tinggi	X	X					X	X					X	X				
6 - 10	Pertimbangan Lain Sedang			X	X					X	X					X	X		
1 - 5	Pertimbangan Lain Rendah					X	X					X	X					X	X
SKALA PRIORITAS PENANGANAN		1	1	4	4	7	7	2	2	5	5	8	8	3	3	6	6	9	9

Keterangan :

1. Berdasarkan kondisi kekumuhan
 - a. Kumuh Berat, nilai 71 – 95
 - b. Kumuh Sedang, nilai 45 – 70
 - c. Kumuh Ringan, nilai 19 – 44

2. Berdasarkan pertimbangan lain :

- a. Pertimbangan lain tinggi , nilai 11 -15
- b. Pertimbangan lain sedang, nilai 6 - 10
- c. Pertimbangan lain rendah, nilai 1 - 5

3. Berdasarkan pertimbangan lain :

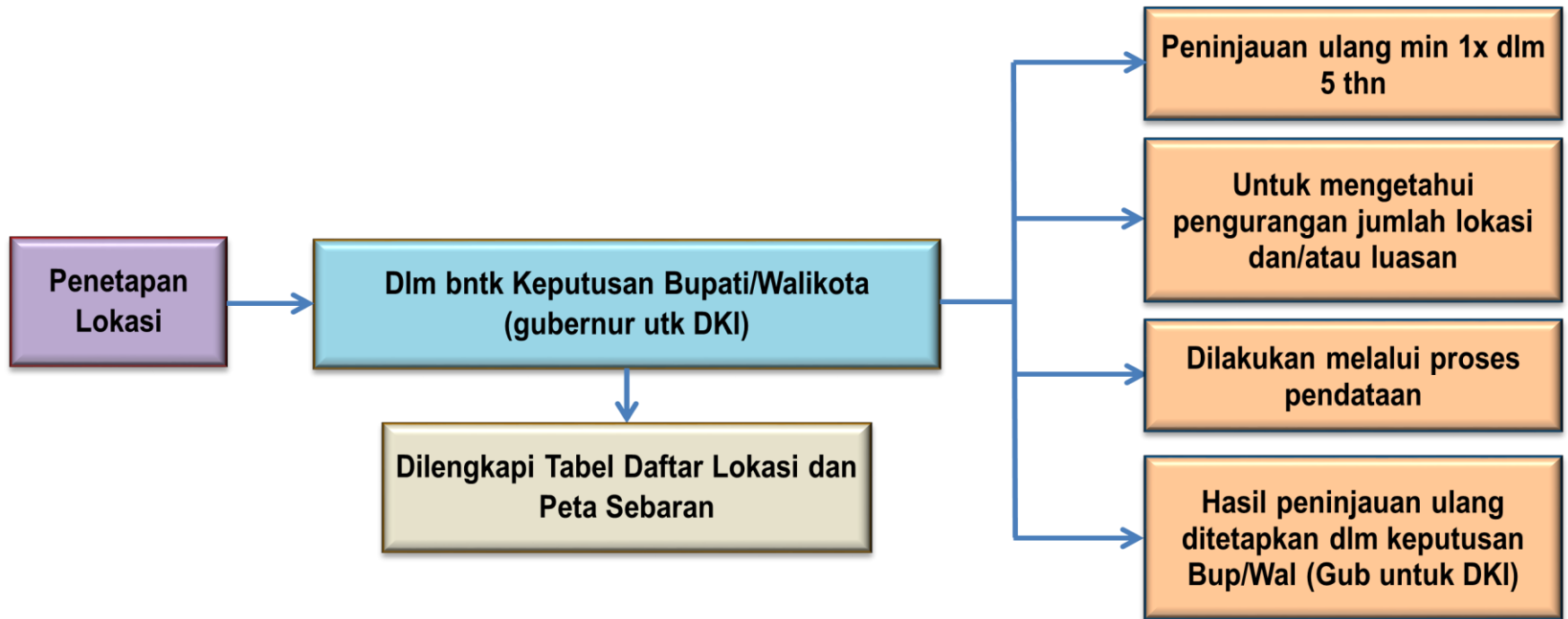
- a. Status tanah legal, nilai positif (+)
- b. Status tanah tidak legal, nilai negatif (-)

Lanjutan Klasifikasi dan Skala Penanganan


Berdasarkan penilaian, terdapat 18 kemungkinan klasifikasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

No	Klasifikasi	Berdasarkan Kondisi Kekumuhan			Berdasarkan Pertimbangan Lain			berdasarkan Kondisi Kekumuhan		Skala Prioritas Penanganan
		Berat	Sedang	Ringan	Tinggi	Sedang	Rendah	Legal	Tidak Legal	
1	A1	✓			✓			✓		I
2	A2	✓			✓				✓	
3	A3	✓				✓		✓		IV
4	A4	✓				✓			✓	
5	A5	✓					✓	✓		VII
6	A6	✓					✓		✓	
7	B1		✓		✓			✓		II
8	B2		✓		✓				✓	
9	B3		✓			✓		✓		V
10	B4		✓			✓			✓	
11	B5		✓				✓	✓		VIII
12	B6		✓				✓		✓	
13	C1			✓	✓			✓		III
14	C2			✓	✓				✓	
15	C3			✓		✓		✓		VI
16	C4			✓		✓			✓	
17	C5			✓			✓	✓		IX
18	C6			✓			✓		✓	

3. Proses Penetapan



3.1 SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh dan Lampiran Peta Profil


 BUPATI/WALIKOTA
 KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
 NOMOR :
 TENTANG
**PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
 DI KABUPATEN/KOTA**
 BUPATI/WALIKOTA

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;

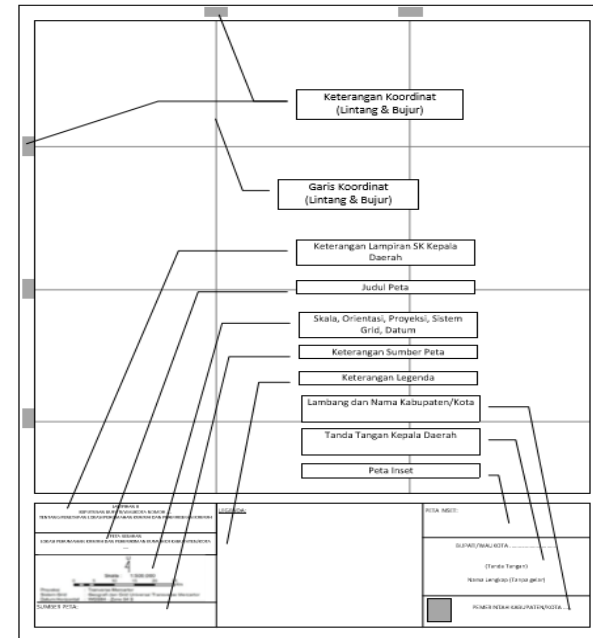
c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran



Gambar 4. Format Peta Sebaran Lokasi

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 Kepala Biro Hukum,
 Siti Martini
 NIP. 195803311984122001

Lampiran SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (Data Detail Permukiman Kumuh)

Tabel Format Daftar Lokasi

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA NOMOR..... TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN/KOTA.....															
NO	NAMA LOKASI	LUAS (HA)	LINGKUP ADMINISTRASI			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERT. LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS
			RT/RW	KELURAHAN /DESA	KECAMATAN / DISTRIK	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	01 / 05	-	< 400 Jiwa /Ha	6° 45 ' 13,71"	6° 45 ' 13,71"	47	Sedang	9	Tingkat	LEGAL	B1/2
2															
3															
4															
5															
dst															

Contoh SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 601/215 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 601/132 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014**

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa penetapan Kawasan Kumuh sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/132 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2014 telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan Survey ke Lapangan;

b. bahwa hasil survey sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan Perubahan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 601/132 Tahun 2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh Perkotaan Kota Pekalongan Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 601/215 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA NOMOR 601/132 TAHUN
2014
TENTANG PENETAPAN KAWASAN
KUMUH PERKOTAAN KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2014**

**DAFTAR LOKASI KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2014**

No.	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN	LUAS KAWASAN KUMUH
1	2	3	4
1	Kecamatan Pekalongan Barat	1. Kelurahan Pasiraari 2. Kelurahan Tirto 3. Kelurahan Kramatsari	17,96 Ha 3,70 Ha 4,50 Ha
2	Kecamatan Pekalongan Timur	1. Kelurahan Klego 2. Kelurahan Poncol	2,89 Ha 9,21 Ha
3	Kecamatan Pekalongan Utara	1. Kelurahan Kandang Panjang 2. Kelurahan Panjang Baru 3. Kelurahan Bardiengan 4. Kelurahan Panjang Wetan 5. Kelurahan Krappak Lor 6. Kelurahan Pebesan 7. Kelurahan Krappak Kidul 8. Kelurahan Degayu 9. Kelurahan Dukuh 10. Kelurahan Kraton Lor	28,22 Ha 40,85 Ha 23,92 Ha 13,85 Ha 6,39 Ha 27,18 Ha 5,51 Ha 0,17 Ha 0,01 Ha 3,65 Ha
4	Kecamatan Pekalongan Selatan	1. Kelurahan Banyurip Ageng 2. Kelurahan Jenggot	6,78 Ha 0,80 Ha


MUHLIYAD BASYIR AHMAD
 WALIKOTA PEKALONGAN

3.2 PENYIAPAN PROFIL

- Baseline data kumuh kota
 - Profil awal permukiman kumuh
 - Peta-peta pendukung
 - SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh
 - Kriteria dan indikator permukiman kumuh yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
 - Peta deliniasi permukiman kumuh.
- Berita acara/keepakatan

I		Sambutan Umum	
Profil			
1. Kriteria			
2. Lokasi			
3. Nama Kawasan			
4. Luas Kawasan (Ha)			
5. Jumlah Penduduk			
6. Jumlah Rumah			
7. Jumlah Penduduk per Rumah			
8. Jumlah Rumah per Penduduk			
9. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
10. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
11. Jumlah Penduduk per Rumah			
12. Jumlah Rumah per Penduduk			
13. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
14. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
15. Jumlah Penduduk per Rumah			
16. Jumlah Rumah per Penduduk			
17. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
18. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
19. Jumlah Penduduk per Rumah			
20. Jumlah Rumah per Penduduk			
21. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
22. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
23. Jumlah Penduduk per Rumah			
24. Jumlah Rumah per Penduduk			
25. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
26. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
27. Jumlah Penduduk per Rumah			
28. Jumlah Rumah per Penduduk			
29. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
30. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
31. Jumlah Penduduk per Rumah			
32. Jumlah Rumah per Penduduk			
33. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
34. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
35. Jumlah Penduduk per Rumah			
36. Jumlah Rumah per Penduduk			
37. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
38. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
39. Jumlah Penduduk per Rumah			
40. Jumlah Rumah per Penduduk			
41. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
42. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
43. Jumlah Penduduk per Rumah			
44. Jumlah Rumah per Penduduk			
45. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
46. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
47. Jumlah Penduduk per Rumah			
48. Jumlah Rumah per Penduduk			
49. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
50. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
51. Jumlah Penduduk per Rumah			
52. Jumlah Rumah per Penduduk			
53. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
54. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
55. Jumlah Penduduk per Rumah			
56. Jumlah Rumah per Penduduk			
57. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
58. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
59. Jumlah Penduduk per Rumah			
60. Jumlah Rumah per Penduduk			
61. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
62. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
63. Jumlah Penduduk per Rumah			
64. Jumlah Rumah per Penduduk			
65. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
66. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
67. Jumlah Penduduk per Rumah			
68. Jumlah Rumah per Penduduk			
69. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
70. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
71. Jumlah Penduduk per Rumah			
72. Jumlah Rumah per Penduduk			
73. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
74. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
75. Jumlah Penduduk per Rumah			
76. Jumlah Rumah per Penduduk			
77. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
78. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
79. Jumlah Penduduk per Rumah			
80. Jumlah Rumah per Penduduk			
81. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
82. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
83. Jumlah Penduduk per Rumah			
84. Jumlah Rumah per Penduduk			
85. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
86. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
87. Jumlah Penduduk per Rumah			
88. Jumlah Rumah per Penduduk			
89. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
90. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
91. Jumlah Penduduk per Rumah			
92. Jumlah Rumah per Penduduk			
93. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
94. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
95. Jumlah Penduduk per Rumah			
96. Jumlah Rumah per Penduduk			
97. Jumlah Rumah per Luas Kawasan			
98. Jumlah Penduduk per Luas Kawasan			
99. Jumlah Penduduk per Rumah			
100. Jumlah Rumah per Penduduk			

4. ILUSTRASI DELIENASI PERMUKIMAN KUMUH

Menyiapkan Peta Dasar / Citra untuk Acuan Survey

1. Siapkan peta dasar arahan lokasi / lokasi terpilih,




Titik Awal Survey

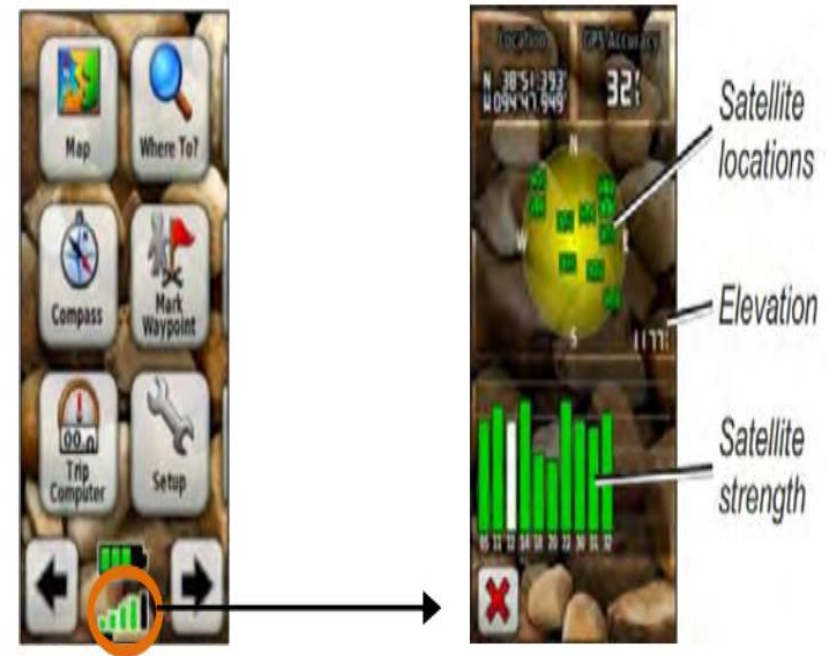
2. Menuju ke titik awal survey kawasan kumuh

Menghidupkan GPS

1. Nyalakan GPS,



2. Tekan  (sinyal satelit) pada menu utama, tunggu beberapa saat sampai mendapatkan sinyal satelit min 4 bar.



Setting Track dengan Garmin GPS

Tracking digunakan untuk mendapatkan data GPS secara kontinu baik dengan batasan waktu ataupun jarak, misal per 10 menit atau per 500 meter GPS akan merekam data koordinat, tracking merekam secara terus menerus data titik koordinat dan menghubungkan antar titik yang ada tersebut menjadi sebuah garis.

Untuk memulai tracking :

1. Tekan menu setup
2. Pilih tracks
3. Kemudian pilih "Record, Show On Map" pada track log



*Track Log dapat di setting untuk mencatat berdasarkan jarak atau waktu, caranya dengan memilih record method, kemudian akan muncul pilihan by distance/jarak, dan by time/waktu

Menyimpan Track Baru

Untuk menyimpan hasil tracking anda pada file baru :

1. Pilih track manager pada menu utama
2. Tekan “current track”
3. Save track dan beri nama
4. Clear data track sebelumnya jika hanya menginginkan track yang akan anda lakukan saja

Tracking Kawasan Kumuh

1. Tracking kawasan kumuh yang telah diidentifikasi
2. Marking dan foto eksisting kawasan kumuh beserta situasi yang ada



*Untuk membentuk delienasi sempurna, titik awal dan akhir survey harus sama

3. Stop track log setelah selesai tracking
4. Save track dan archive

Transfer Data Hasil Tracking

Untuk mentransfer data track, rute, atau titik arah dari GPS dapat memakai aplikasi **MapSource**

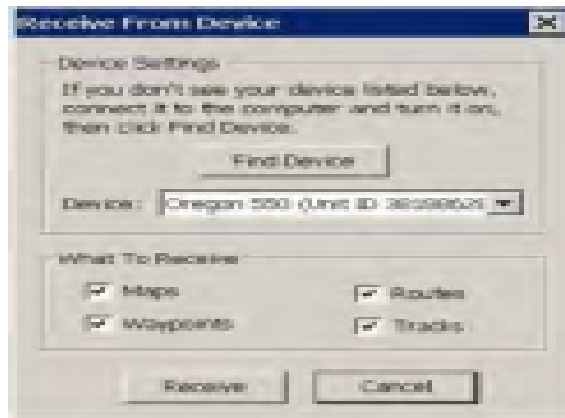
1. Hubungkan GPS ke komputer yang telah anda install aplikasi mapsource dengan kabel USB
2. Open MapSource pada komputer anda



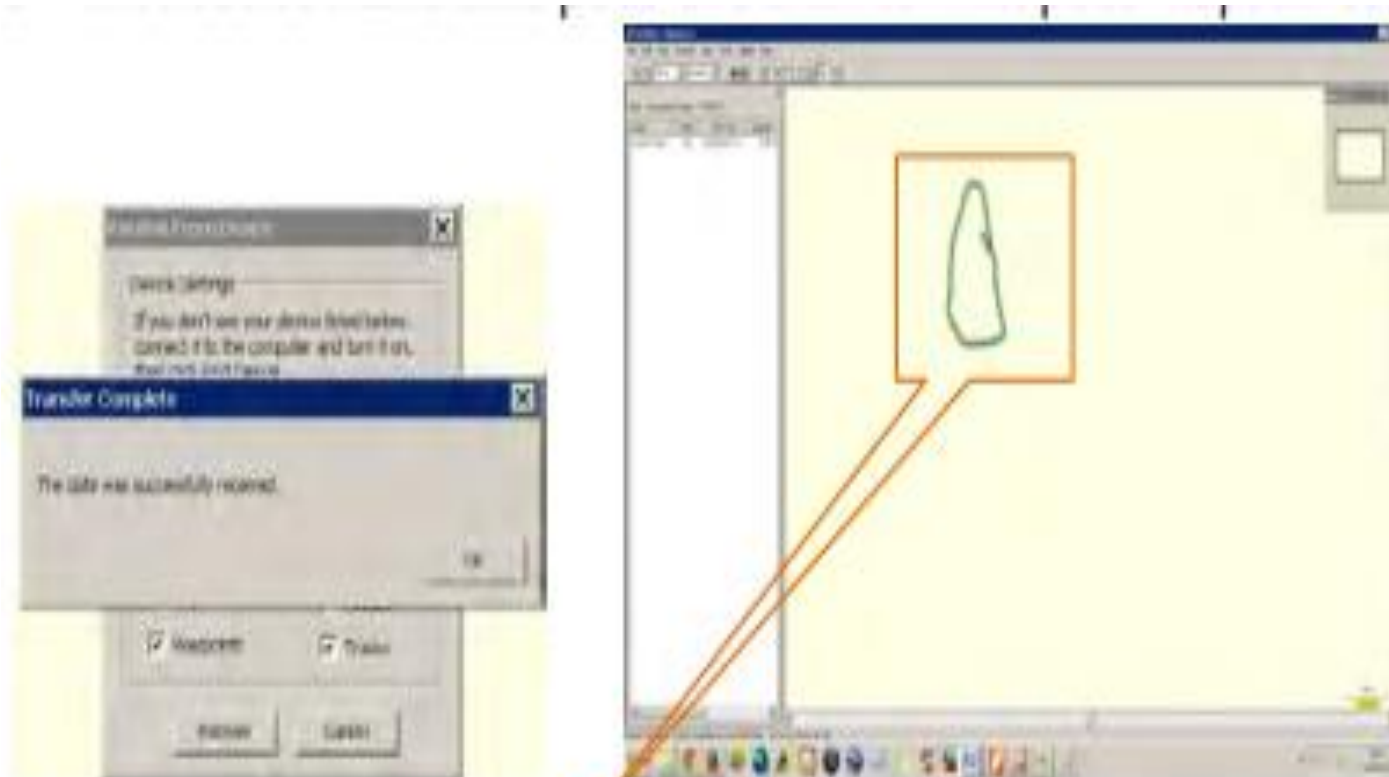
3. Klik menu transfer dan receive from device



4. Find device, pada check box “what to receive” pilih data yang ingin anda transfer, dalam hal ini pilih track atau dapat juga pilih waypoint jika diperlukan



5. Klik receive maka data GPS akan terlihat pada mapsource



Hasil Tracking pada GPS

6. Select track, kemudian save dalam format gpx

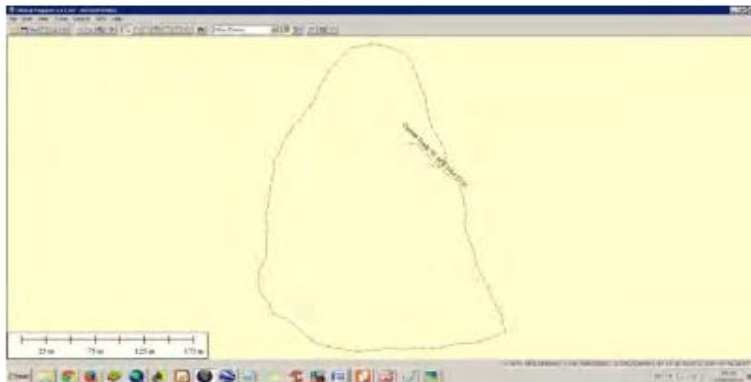


Merubah Format Data

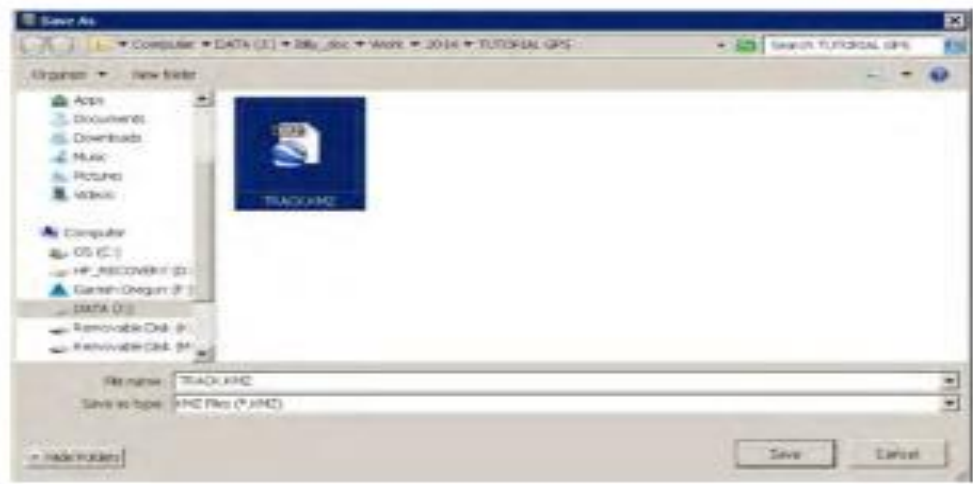
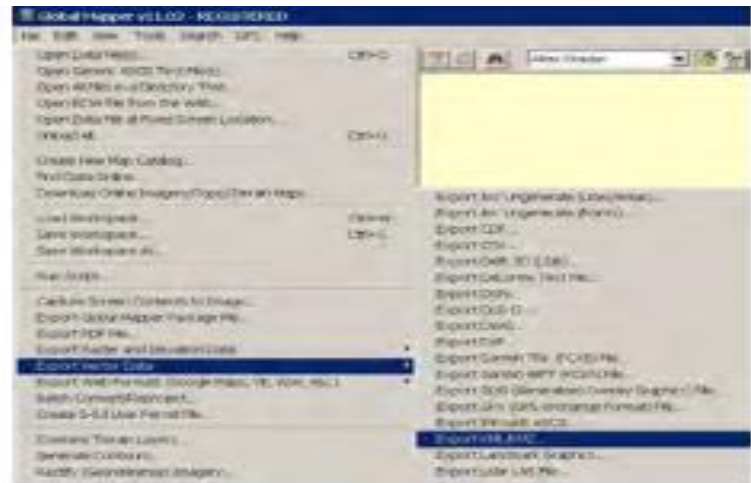
Tahap selanjutnya adalah merubah format menjadi .shp untuk mengolah data track dan merubah menjadi polygon atau .kmz untuk dilayer pada google earth. Aplikasi yang dapat digunakan untuk merubah format adalah global mapper.



1. Open file. Gpx menggunakan global mapper
2. Klik “open your own data files”, select data gpx, kemudian open.



3. Klik menu file, → “export vector data” save as dalam format .shp (shapefile) atau .kmz



4. Hasil Tracking yang telah diubah menjadi format . kmz dapat dilihat pada aplikasi google eaarth. Open google earth → File → Open file . kmz

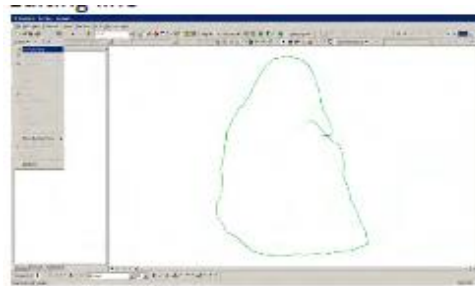


5. Untuk edit dan convert menjadi polygon dapat menggunakan software ArcGIS

- Open ArcGIS
- Add data .shp

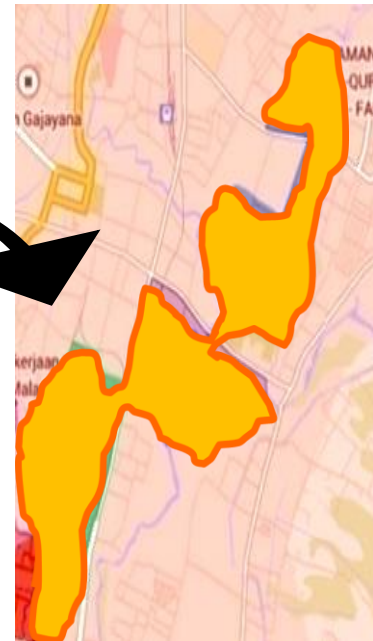
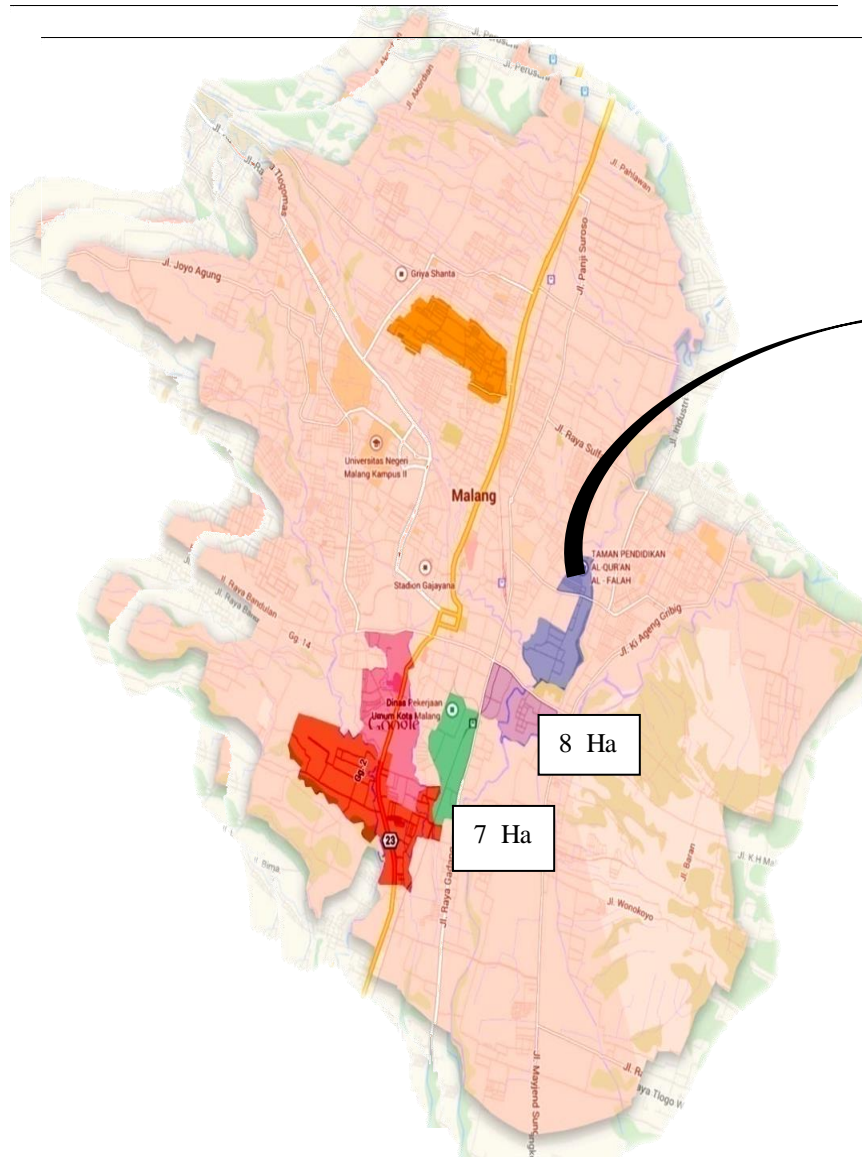


- Edit data



- Convert polyline to polygon





Total Luas Permukiman Kumuh: 21 Ha

**Tipologi sama
Tingkat Kekumuhan sama**

Penutup

Setelah anda mempelajari teknik delienasi menggunakan petunjuk teknis ini dan didukung oleh sumber sumber lain yang dapat memperkaya wawasan anda , diharapkan anda dapat mendelienasi kawasan kumuh secara tepat.